



Beri Jaminan Ruang Aman

Raperda KLA Akomodir Poin Krusial
Klithih dan Daycare

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Komitmen untuk mengembalikan marwah Kota Yogyakarta sebagai jaminan ruang aman bagi generasi penerus mulai digulirkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta telah bersepakat, mengakomodir masalah sosial yang menyangkut anak dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA).

Langkah ini menjadi babak baru untuk merombak

regulasi usang yang dinilai sudah loyo dalam membendung dinamika sosial dan ancaman kekerasan terhadap anak di Kota Gudeg.

Ketua Pansus Raperda KLA DPRD Kota Yogyakarta, Cahyo Wibowo mengungkapkan, pembahasan intensif bersama pihak eksekutif ini merupakan estafet dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Aspirasi dari akar rumput tersebut kini mulai disuntikkan ke dalam draf regulasi anyar.

■ Baca BERI... Hal II

Cahyo Wibowo
Ketua Pansus
Raperda KLA
DPRD Kota
Yogyakarta



Beri Jaminan Ruang Aman

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Ini momentum krusial untuk memulihkan citra Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sekaligus Kota Ramah Anak. Kita tidak ingin aturan ini sekadar normatif. Makanya, masukan dari RDPU langsung kita formulasikan ke dalam batang tubuh Raperda agar taji perlingkungannya benar-benar konkret dirasakan masyarakat," tegas Cahyo, kemarin (20/5).

Cahyo mengungkapkan, dari pembahasan, Pansus membedah sejumlah borok

sosial yang belakangan menghantui publik Yogyakarta. Mulai dari bayang-bayang kelim kejahatan jalanan atau klitih, tren kekerasan anak yang masih fluktuatif, hingga mendesaknya pengawasan ketat terhadap operasional tempat penitipan anak (daycare).

Guna meredam persoalan tersebut, regulasi ini nantinya bakal mempertegas fungsi preventif. Salah satunya dengan mengoptimalkan

peran kelembagaan, seperti Forum Anak hingga unit layanan perlindungan di tingkat paling bawah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengingatkan agar regulasi yang digodok memiliki ikatan yuridis yang kuat. Dirinya mewanti-wanti agar predikat Kota Layak Anak yang disandang Yogyakarta selama ini tidak melulu menjadi pajangan atau pemanis di atas kertas di

tengah gempuran kasus kekerasan yang sempat mencuat.

"Penilaian dan predikat KLA itu harus berbanding lurus dengan realitas objektif yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Aksi nyata jauh lebih dinanti ketimbang sekadar angka capaian," cetus Rihari.

Legislatif dan eksekutif tersebut akhirnya menyepakati satu formula penting. Yaitu Peraturan Daerah (Perda) yang

nantinya mengakomodir aspek pencegahan dini dengan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta ke dalam draf hukum.

Lewat penguatan payung hukum itu, dewan menargetkan kecemasan para orang tua terhadap keamanan ruang publik bisa diredam. Muaranya, hak tumbuh kembang anak di Kota Yogyakarta bisa berjalan optimal tanpa harus dibayangi ketakutan menjadi korban kekerasan di jalanan. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005